



PERTARUNGAN DUA BINTANG

Rivalitas Ideologi Soemitro dan Ali Moertopo Tahun 1974-1978

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

Kudus Purnomo

NIM. 13030112130095

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Kudus Purnomo menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi ini adalah asli hasil karya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata (S1), Strata (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua Informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 6 April 2017

Penulis

Kudus Purnomo

NIM. 13030112130095

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Lahirna Kaulaning Gusti
Bathina Kaulaning Rosul
Abdina Kaulaning Negara

Maha Guru O.S. LUMIKA (1944-2009)

“Wat verschijnt, wat verdwijnt, ‘t hangt niet aan een los gevel, in ‘t voorleden, light het heden, in het nu wat worden zal”.

(Apa yang timbul, dan apa yang tenggelam, tidak tercerai berai, melainkan berkesinambungan, hari kemarin memangku hari sekarang, dan hari sekarang menumbuhkan hari depan).

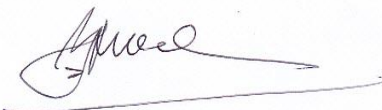
Willem Bilderdijk (1756-1831)

Dipersembahkan kepada:

Keluarga tercinta, para sahabat,
dan seseorang yang berarti
dalam hidupku.

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yety Rochwulaningsih', with a long horizontal line extending to the right.

Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M. Si.
NIP. 196106051986032001

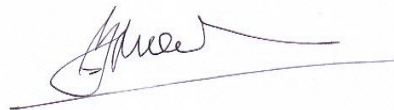
Skripsi dengan judul “Pertarungan Dua Bintang: Rivalitas Ideologi Soemitro dan Ali Moertopo Tahun 1974-1978” yang disusun oleh Kudus Purnomo (13030112130095) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada 6 April 2017.

Ketua,



Prof. Dr. Dewi Yulianti, M.A
NIP.195407251986032001

Anggota I,



Prof. Dr. Yety Rochwulansih, M.Si
NIP.196106051986032001

Anggota II,



Dr. Agustinus Supriyono, M.A
NIP. 195508151987031001

Anggota III,



Dra. Titiek Suliyati, M.T
NIP. 195612191987032001

Mengetahui,

Dekan



Dr. Rodyanto Noor, M.Hum
NIP. 195903071986031002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, kritik saran, dan fasilitas lainnya. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Dr. Danang Respati Puguh M.Hum. selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pengajar di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bimbingannya dengan tulus ikhlas, selama penulis menjalankan studinya di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Om Romli selaku staf perpustakaan Departemen Ilmu sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Terimakasih dan apresiasi juga penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Edi Martono, M.Sc. dan Eko Sugiharto, Ph.D. yang telah senantiasa membagi pengalamannya kepada penulis disaat penulis melakukan riset lapangan, dan tidak lupa juga terimakasih penulis haturkan kepada Dr. Hariman Siregar yang telah bersedia duduk dan berdiskusi bersama selama penulis melakukan kirtik sumber.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada orangtua, adik, kakak, dan teman-teman seperjuangan di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Juga teman-teman kuliah subuh, yang telah memberikan bimbingan saran dan juga khususnya motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Moh. Annas selaku dosen kuliah subuh yang telah bersedia menjadi mentor, untuk menjadikan mahasiswa yang santun dan

berbudi pekerti yang baik dan terkadang menjungkir-balikan teori dan *historical madness*. Ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada teman-teman yang telah berjuang bersama dalam tim Penggerak Pesantren Maritim diantaranya: Lisnur Siti Faridah, Firman Adi Laksono, Rufal Febrian, Aprilia Putri Utami, Dian Pangestu, dan juga bapak alias Arif Syaefudin, Ikhsan Nurfaiz Rusdi, Achmad Rahdian Umar, Rafngi Mufidah, dan teman-teman MSG yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan diharapkan tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan. Terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya juga penulis tujukan kepada Hanifah yang telah bersedia menjadi *partnership* penulis selama menjalankan masa studi, penulis mendoakan semoga dirimu selalu diberkahi oleh Allah S.W.T.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan. Terimakasih.

Semarang, 6 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
RINGKASAN	xx
SUMMARY	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	3
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II PROFIL DUA BINTANG: PRAJURIT PROFESIONAL DAN PRAJURIT POLITIK	25

	A. Kondisi Politik Militer Indonesia Pada Tahun 1970-an	25
	B. Jenderal Soemitro	29
	C. Mayjen Ali Moertopo	39
BAB III	RIVALITAS JENDERAL SOEMITRO DAN MAYJEN ALI MOERTOPO	48
	A. Kondisi Sosial Politik Mahasiswa Tahun 1970-1974	48
	B. Munculnya Rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo	53
	C. Puncak Persaingan Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo	65
BAB IV	DAMPAK RIVALITAS JENDERAL SOEMITRO DAN MAYJEN ALI MOERTOPO TERHADAP KEHIDUPAN KAMPUS	70
	A. Reaksi Presiden Soeharto Mengenai Rivalitas Elite Militer	70
	B. Pelarangan Kegiatan Politik di Kampus	78
	C. Melemahnya Politik Mahasiswa	80
BAB V	SIMPULAN	92
	DAFTAR PUSTAKA	96
	DAFTAR INFORMAN	101
	LAMPIRAN	103

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Angkatan Darat
AKABRI	: Akademi Angkatan Bersenjata Indonesia
Aspri	: Asisten Pribadi
Bakin	: Badan Koordinasi Intelijen
Bapilu	: Badan Pemenangan Pemilu
BKR	: Badan Keamanan Rakyat
CSIS	: <i>Center Strategic of International Studies</i>
Dema	: Dewan Mahasiswa
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
Dwikora	: Dwi Komando Rakyat
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
Golkar	: Golongan Karya
GUPPI	: Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam
Hankam	: Pertahanan-Keamanan
HIS	: <i>Hollands Inlandsche School</i>
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
Kas Hankam	: Kepala Staf Pertahanan-Keamanan
KKO AL	: Korps Komando Angkatan Laut
KNIL	: <i>Koninklijk Neterlands Indisch Leger</i>
Koplat	: Komando Pendidikan Pelatihan Angkatan Darat
Letkol	: Letnan Kolonel
Malari	: Malapetaka Lima Belas Januari
Monas	: Monumen Nasional
MULO	: <i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs</i>
NEFIS	: <i>Netherlands Forces Intelligence Servise</i>
NKK/BKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi

	Kampus
Opsus	: Operasi Khusus
Orba	: Orde Baru
Orla	: Orde Lama
Pangdam	: Panglima Daerah Militer
Pangkopkamtib	: Panglima Komando Keamanan Ketertiban
Pangkowilu	: Panglima Komando wilayah umum
Pelita	: Pembanguna lima tahun
Pepera	: Penentuan pendapat rakyat
Persma	: Pers Mahasiswa
Perbum	: Persatuan buruh minyak
PGM	: Penggalang Generasi Muda
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
POPDA	: Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
Pusif	: Pusat Infantri
Re-Ra	: Reorganisasi-Rasionalisasi
SKOGAR	: Staf Komando Garnisun
SP-11-Maret	: Surat Perintah 11 Maret
SSKAD	: Sekolah Staf Komando Angkatan Darat
TMII	: Taman Mini Indonesia Indah
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Trikora	: Tri Komando Rakyat
Wanjakti	: Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi

DAFTAR ISTILAH

- Adversary Journalism* : Model jurnalistik penentang pemerintah/ berbasis ide yang kerap digunakan oleh mahasiswa 1970-an untuk mengkritisi pemerintahan orba setelah mengalami tindakan represif dari Kopkamtib.
- Angst Psychose* : Strategi yang dilakukan oleh Soemitro pada saat memberantas gerakan separatis dengan menciptakan rasa takut agar selalu merasa tidak aman di satu lokasi dan dipaksa harus berpindah-pindah
- Anti Gerilya : Suatu strategi operasi militer yang dilakukan Soemitro saat memberantas gerombolan separatis yang dipimpin oleh Malik dengan merebut simpati rakyat dari gerombolan separatis agar berpihak kepada TNI
- Back to Campus* : Adalah suatu istilah yang memiliki arti “Kembali ke kampus” dan kerap kali menjadi tuntutan mahasiswa terhadap teknokrat dan ekonom pada masa orba
- Biang Keladi : Adalah pihak yang menjadi penyebab terjadinya suatu perbuatan jahat, terkait skripsi ini biang keladi menjadi stigma yang dipakai untuk menuduh dalang di balik peristiwa Malari
- Buyu* : Suatu ideologi “Keberanian Prajurit” yang ditanamkan oleh Jepang terhadap Soemitro semasa menjadi perwira PETA.
- Chetsu* : Suatu ideologi untuk mengabdikan kepada negara yang ditanamkan oleh Jepang terhadap Soemitro semasa menjadi perwira PETA.
- Conflicting Interest* : Suatu keadaan dimana terjadi konflik intern para mata yang terjadi di Surabaya, dan Soemitro kala itu ditugaskan oleh Soeharto untuk menyelesaikan konflik tersebut.
- De-nasakomisasi : Adalah suatu strategi politik yang dilakukan oleh Soeharto untuk menangkalkan kekuatan pro-Soekarno dengan cara menghilangkan unsur yang berbau Nasional-Agama-Komunis
- Dewan Mahasiswa : Adalah Organisasi mahasiswa intern kampus yang digunakan oleh mahasiswa generasi 1970-an untuk melakukan protes dan gerakan sosial
- Faksionalisasi : Pengelompokan yang berujung pada pertentangan, terkait skripsi ini adalah pengelompokan yang terjadi pada perwira ABRI

Intelijen Jejaring	: Intelijen yang di himpun oleh Ali Murtopo yang keanggotaannya berisikan para mahasiswa, pemimpin universitas, dan tokoh agama
Intelijen Organik	: Intelijen yang keanggotaannya adalah para perwira aktif dibawah komando Ali Murtopo
Jepang Neo-kolonialis	: Tuduhan yang diutarakan mahasiswa terhadap Jepang yang dianggap meakukan penjajahan model baru terhadap Indonesia.
<i>Journal of Opinion</i>	: Suatu bentuk penulisan berita yang berlandaskan pada pandangan ideologi dan sering digunakan oleh mahasiswa sebagai alat kritik pemerintah orba
Kaca Mata Kuda	: Suatu Pandangan sepihak pemerintah orba dalam melakukan pengebirian terhadap aktivitas politik di kampus
Kepasifan Politik Mahasiswa	: Keadaan dimana melemahnya partisipasi politik di kalangan mahasiswa setelah diterapkannya kebijakan NKK/BKK dan pemberedelan pers mahasiswa
<i>Kup</i>	: Suatu strategi dan tindakan kelompok yang ingin menjatuhkan kekuasaan, terkait skripsi ini adalah suatu isu yang menyerang Soemitro, bahwa ia dan kelompoknya ingin menjatuhkan kekuasaan orba
<i>Long March</i>	: Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menempuh jalan kaki bersama
Makar	: Makar adalah perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah dengan cara-cara institusional, terkait skripsi ini adalah tuduhan bahwa gerakan mahasiswa telah ditunggangi oleh pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan dengan cara inkonstitusional
Militeristik	: Sistem pemerintahan yang bercorak militer, terkait skripsi ini keadaan dimana peran militer amat besar dalam jalannya pemerintahan orba
MPR Jalanan	: Suatu keadaan dimana mahasiswa menekan pemerintahan lewat keputusan sepihak melalui demonstrasi
Normalisasi Kampus	: Pembersihan kampus dari unsur politik
<i>Onderbouw</i>	: Organisasi sayap suatu organisasi induk, terkait skripsi ini adalah suatu partai yang anggotanya biasanya diisi oleh para mahasiswa
<i>Partnership</i>	: Kedekatan individu (elit militer) dengan kelompok (mahasiswa) untuk melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai.
Pembredelan Pers	: Larangan terbit untuk media massa yang dianggap

	provokatif pada masa orba
Pengkebirian Politik	: Usaha untuk mematikan hak politik praktis mahasiswa dengan cara menurunkan fungsi dan peranan melalui kebijakan dan tindakan represif
Politik Praktis	: Keadaan dimana ambisi dan kepentingannya hadir bersamaan dan saling berhimpitan untuk ikut serta dalam memperebutkan kekuasaan dalam hal ini adalah keterlibatan elit militer dan mahasiswa dalam politik orde baru
<i>Reigi</i>	: Suatu doktrin sopan santun yang didapat Soemitro saat menjadi perwira PETA, dalam rangka menciptakan kesatuan tentara pada tubuh PETA
<i>Resi</i>	: Resi diartikan sebagai orang suci yang bijaksana, terkait dengan skripsi ini adalah mahasiswa diibaratkan sebagai pihak yang netral yang mengemban fungsi kontrol sosial
Rezim 9 Bahan Pokok	: Sindiran mahasiswa terhadap zaman orba yang melakukan pemantapan harga 9 bahan pokok
Rivalitas	: Persaingan dan pertentangan individu atau kelompok yang memperebutkan sumber daya, dalam hal ini adalah rivalitas Soemitro dan Ali Moertopo dalam memperebutkan pengaruh politik baik dimata Presiden dan mahasiswa
Safari Politik	: Safari adalah perjalanan jarak jauh, terkait skripsi ini safari politik adalah suatu strategi yang dilakukan oleh Soemitro dan Ali Moertopo dalam menghimpun kekuatan (massa) dengan mengunjungi kampus-kampus untuk melakukan konsolidasi politik kepada mahasiswa
<i>Sennin</i>	: Jabatan komandan dalam struktur tentara Jepang
<i>Shisso</i>	: Suatu doktri yang di dapat oleh Soemitro semasa menjadi perwira PETA, bahwa seorang tentara PETA harus hidup sederhana
<i>Shodanco</i>	: Komandan kompi dalam satuan militer Jepang yang menjadi jabatan tertinggi Soemitro semasa karirnya di PETA
<i>Show of Force</i>	: Demonstrasi unjuk kekuatan yang dilakukan oleh KKO di Surabaya sebagai bentuk protes terhadap Presiden Soeharto yang melakukan De-Soekarnoisasi
<i>Small Unit Tactic and Mental Physical Caurage</i>	: Suatu bentuk latihan militer yang di dapat oleh Soemitro saat mengenyam pendidikan militer Jepang yang menekankan pada semangat menyerang yang berfokus pada keberanian mental dan kekuatan fisik

- Stufenbau Der Rechtsortnung* : Prinsip hukum yang mendasari bahwa hukum harus mempunyai dasar dan sumber dalam produk hukum yang lebih tinggi
- Subversi : Suatu tujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan menggunakan cara di luar Undang-undang, terkait skripsi ini adalah Subversi dijadikan stigma pemerintah orba dalam memandang suatu gerakan diluar pemerintah yang dilakukan oleh pihak atau kelompok yang dianggap merongrong kekuasaan.
- Sustainable* : Adalah suatu manajemen yang mengedepankan keberlanjutan, terkait skripsi ini adalah suatu kritik yang diutarakan oleh mahasiswa terhadap pemerintah orba mengenai pembangunan yang tidak berkesinambungan dan hanya menghabiskan uang rakyat.
- Wehrkreise Stelsel* : Suatu strategi yang dilaksanakan oleh Soemitro dalam pertempuran di Tegalwaru dengan membangun daerah pertahanan
- Wingate Action* : Konsep serangan yang dilakukan oleh Soemitro pada saat melawan tentara Belanda di Malang, dengan cara prajurit masuk menerobos ke daerah musuh ketika musuh sedang menyerang

DAFTAR TABEL

Tabel:		Halaman
1.1	Tipe dan Orientasi Militer	17
2.1	Riwayat Hidup Soemitro D.S., Jenderal TNI (Purn)	40
2.2	Riwayat Karier Mayjen Ali Moertopo	50
4.1	Perubahan Orientasi Penerbitan Pers Mahasiswa	85
4.2	Persentase Rubrik Karikatur Salemba dan Gelora Mahasiswa	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:		Halaman
A	Briefing intelijen Letjen Ali Moertopo	104
B	Riwayat Hidup Mangkyo Ali Moertopo N.R.P/N.B.I. 1602 Arsip Pertahanan Keamanan RI Dinas Sejarah TNI AD	105
C	Laporan Khusus Bidang Keamanan No.12- 96/LCT/6/1971 Laksus Pangkopkamtib Sumbar	106
D	Keputusan Menteri tentang Pedoman Umum Organisasi dan Keanggotaan Badan Organisasi Kemahasiswaan Universitas/Institut Negeri	107
E	Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perguruan Tinggi Di Indonesia	108
F	Keputusan Kemendikbud tentang NKK	109
G	Keputusan Kemendikbud No.037/U/1979 tentang Bentuk Susunan Lembaga/Organisasi Kemahasiswaan Di Lingkungan Perguruan Tinggi Depdikbud	113
H	Keputusan Kemendikbud No.0125/U/1979 tentang Penertiban Acara/Upacara Penerimaan Siswa dan Mahasiswa Baru dalam Rangka Pengenalan Studi	115
I	Penertiban Kampus: Cagar Alam Kebebasan Pers oleh Dhaniel Dhakidie	116
J	Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sistem Politik: Suatu Tinjauan oleh Burhan D. Magenda	117
K	Peran Mahasiswa sebagai Intelejensia oleh Arif Budiman	118
L	Mahar: Salemba Kampus dan Politik Praktis	119

RINGKASAN

Skripsi ini berjudul *PERTARUNGAN DUA BINTANG: Rivalitas Ideologi Soemitro dan Ali Moertopo Tahun 1974-1978*. Beberapa permasalahan yang akan dikaji yaitu: 1) Bagaimana dan mengapa terjadi rivalitas dua bintang dari AD antara Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo. 2) Bagaimana dampak dari rivalitas tersebut terhadap dinamika mahasiswa tahun 1974 hingga diterapkannya kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Untuk mengkaji permasalahan tersebut digunakan metode sejarah kritis yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: a) heuristik, mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder. b) kritik sumber, proses yang dilakukan untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. c) interpretasi menafsirkan dan menyusun antara fakta satu dengan lainnya. d) historiografi, proses penulisan kembali peristiwa sejarah. Dengan demikian, dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan ilmu sosiologi, psikologi sosial dan ilmu politik untuk mengkaji konsep peranan, perbedaan orintasi kedua pihak yang berkonflik, dan rivalitasnya dalam menghimpun basis kekuatannya di kalangan mahasiswa.

Rivalitas yang terjadi antara Soemitro dan Ali Moertopo adalah dampak dari kebijakan dwi fungsi ABRI sebagai *grand design* politik orde baru, yang telah memberi peluang masuknya militer ke jaringan pemerintahan dalam rangka untuk menciptakan pengawasan yang ketat dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas, sebagai prasyarat utama dalam melaksanakan pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah mendapat kecaman dari “gerakan mahasiswa” yang pada awal tahun 1970an menepatkan posisi sebagai resi (pengecam keadaan sosial) pemerintahan. Mahasiswa menganggap strategi pembangunan yang digalang orde baru dipandang oleh mahasiswa tidak *sustainable* dan hanya menguntungkan segelintir elit pemerintahan. Melihat aksi protes mahasiswa yang terus bergulir, pemerintah mulai menyusun strategi untuk membendung aksi protes mahasiswa. Melalui lembaga-lembaga pengendali konflik sosial seperti Kopkamtib, Aspri dan Opsus, gerakan mahasiswa yang menggelora coba dipadamkan melalui pendekatan keamanan. Dalam usaha membendung aksi protes mahasiswa, terdapat dua nama elit militer yang muncul yaitu Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo. Kedua elite militer tersebut memiliki strategi yang berbeda dalam menangani mahasiswa, Jenderal Soemitro lebih terlihat persuasif dan sebaliknya Mayjen Ali Moertopo bertindak represif. Strategi yang awalnya membendung aksi mahasiswa, berubah menjadi ajang untuk menghimpun masa dan menggalang kekuatan dan berujung kepada rivalitas keduanya.

Rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo mencapai puncaknya pada peristiwa Malari, yaitu dimana aksi mahasiswa memprotes masuknya modal asing. Rivalitas yang terjadi diantara keduanya berdampak pada pecahnya gerakan mahasiswa, antara kelompok mahasiswa UGM dan kelompok mahasiswa UI. Pada tataran elit terjadi perubahan beberapa struktur lembaga negara, dan mutasi jabatan yang dialami oleh dua elite militer tersebut, yang memperlihatkan bahwa

rivalitas yang terjadi dimenangkan oleh Mayjen Ali Moertopo. Selaku pihak yang memenangkan rivalitas, Ali Moertopo dan kelompoknya menjadi pihak penjaga rezim orba dari kelompok yang mencoba merongrong kekuasaan. Kelompok yang paling merasakan dampak dari rivalitas tersebut adalah mahasiswa, pasca Malari dan rivalitas tersebut mahasiswa digiring untuk meninggalkan kegiatan yang berhubungan dengan politik melalui kebijakan NKK/BKK. Pers mahasiswa yang dahulu menjadi alat politik mahasiswa pun tidak terlepas dari tindakan represif pemerintah, pers mahasiswa yang sekiranya dianggap memprotes pemerintah mengalami pembredelan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengebiri politik kampus yang muaranya berdampak kepada menurunnya aktivitas politik mahasiswa.

SUMMARY

The title of this thesis is *PERTARUNGAN DUA BINTANG: Rivalitas Ideologi Soemitro dan Ali Moertopo Tahun 1974-1978*. Some issues that will be discussed here are : 1) How and why did the rivalry of the two stars between Army General Soemitro and Army Major General Moertopo happen. 2) How is the impact of the rivalry towards the dynamics of the students in 1974 to the implementation of NKK/BKK policy in 1978. To discuss those problems, it needs to use critical historical method which consist of four steps, namely : a) heuristics, finding and collecting the historical resources, b) criticism sources, the process which is done to know the sources of authenticity and credibility, c) interpretation, interpret and compile the facts to one another, d) historiography, the process of rewriting historical events. Thus, this thesis writing use sociological, psychological and political approach to study the role concept, the difference in orientation of both conflicting sides, and its rivalry in compiling the power base among the students.

The rivalry occurred between Soemitro and Ali Moertopo was the consequence of Republic Indonesia Armed Forces (ABRI) dual function as *grand design* of new order politics, which its access made military went into government network in order to create stability as the main requirement in implementing development. However, in the implementation, the government got criticisms from “students movement” which in the beginning of 1970s, it stated the position as *rishis* (critic of social condition) of the government. Students considered that the development strategy raised by new order which has been viewed by the students was not *sustainable* and only benefit a number of government elite. Seeing the students’ protest action that continued like a snowball, government started arranging the strategy to hold students’ protest action. Through conflict controlling institutions such as Kopkamtib, Aspri and Opsus, the students were calmed through persuasive action. In the effort to hold students’ protest action, there were two military elite names which emerged such as General Soemitro and Major General Ali Moertopo. Both military elites have different strategy in handling the students, General Soemitro looked more persuasive, while Major General Ali Moertopo acted repressively. The strategy which at first hold the students’ action, turned into the event to compile the mass and to raise power which resulted to their rivalry.

The rivalry of General Soemitro and Major General Ali Moertopo has reached the peak on Malari event, when students protest foreign capital. Rivalry which occurred between them both resulted in the break up of students movement, between UGM students and UI students. At the elite level, there were changes in some structures of state institutions and job mutation which has been experienced by those two military elites which showed that the rivalry was won by Major General Ali Moertopo. As the rivalry winning side, Ali Moertopo and his group became the custodian of the new order regime which tried to undermine the power. The group which felt the impact the most from the rivalry was the

students, after Malari and that rivalry, the students were led to abandon the political activities through NKK/BKK policy. Student press which at first has been being the political means was also inseparable from government's repressive action, student press considered protesting the government was banned. This was to remove campus politics which resulted in students political loneliness.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Masa Orde Baru (Orba) adalah masa pemerintahan yang dipimpin dengan sistem militeristik, dimana peran militer amat besar dalam jalannya pemerintahan. Sebagai contoh, banyak elite militer yang menjabat posisi penting dan strategis di luar bidang pertahanan dan keamanan (hankam), bahkan banyak pula yang merangkap jabatan dalam pemerintahan.¹ Di antara unsur-unsur dalam militer yang paling dominan berperan di bidang non hankam adalah Angkatan Darat (AD), sehingga iklim kontestasi, faksi bahkan friksi dan rivalitas sangat kuat di lingkungan AD. Rivalitas diantara perwira tinggi apalagi yang memiliki jabatan strategis sangat menarik untuk dikaji, karena akan terkait langsung dengan kebijakan yang berimplikasi terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Dari sekian banyak rivalitas diantara perwira tinggi dalam tubuh AD, sangat menarik mengkaji rivalitas antara Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo. Rivalitas kedua perwira tinggi itu sangat menarik karena keduanya memiliki posisi strategis, yaitu Jenderal Soemitro menjabat sebagai Panglima Komando Keamanan Ketertiban (Pangkopkamtib) dan Mayjen Ali Moertopo menjabat sebagai Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto.²

Adanya rivalitas antara Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo tidak bisa dilepaskan oleh adanya pengelompokan dan *faksionaliasi* dalam tubuh AD. Hal ini dipertegas oleh Jenderal A.H. Nasution dalam bukunya yang berjudul

¹Mengenal Wajah-Wajah Baru Kabinet pembangunan, *Suara Merdeka*, 1 April 1978.

²Jenderal Sumitro Tidak ada Penggantian Pimpinan Nasional, *Berita Yudha*, 3 Januari 1974.

“Mengawal Nurani Bangsa”³ yang mengatakan bahwa rivalitas yang terjadi antara jenderal-jenderal memang terjadi, sekalipun semua tetap patuh kepada Presiden Soeharto. Rivalitas yang terjadi antara Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo menimbulkan isu di masyarakat, yaitu isu akan adanya pergantian pimpinan nasional.⁴

Rivalitas kedua elite militer ini belum menjadi perhatian khusus bagi para sejarawan untuk dikaji secara ilmiah terutama dalam kaitannya dengan cara-cara pengendalian masa rakyat di dalam kampus. Namun demikian, telah ada sejarawan yang mengkaji hal yang mendasari urgensi pengendalian masa rakyat di dalam kampus dengan belajar dari peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) atau demonstrasi anti Jepang. Pada penulisan skripsi ini, penulis mencoba merekonstruksi dampak dari rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo terhadap Normalisasi Universitas-Universitas di Indonesia, artinya kampus dilarang melakukan kegiatan politik praktis.⁵

Peristiwa Malari dijadikan dasar kebijakan pemerintah untuk melakukan normalisasi kehidupan di dalam kampus, karena peristiwa Malari dianggap sebagai tindakan politik praktis yang mengarah subversi/ makar kepada pemerintah yang sah.⁶ Peristiwa Malari adalah suatu peristiwa yang sampai saat ini masih menjadi polemik, sebab pemerintah (militer) dan mahasiswa memiliki interpretasi yang berbeda. Perbedaan interpretasi tersebut juga terjadi di dalam tubuh elite AD. Hal ini terlihat dari cara Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo saat melakukan seminar dan ceramah-ceramah di universitas dalam

³AH.Nasution, *Mengawal Nurani Bangsa*, (Jakarta:Yayasan Kasih Adik Berkerjasama dengan DISBINTALAD, 2008), hlm. 31.

⁴Pangkokamtib Sumitro Bantah Issue Pergantian Pimpinan Nasional, *Sinar Harapan*, 3 Januari 1974.

⁵Petunjuk-petunjuk Pembinaan Kampus Tetapkan Kampus Dilarang Lakukan Kegiatan Politik, *Angkatan Bersenjata*, 4 Februari 1974.

⁶Tanggapan Pemerintah tentang: Kegiatan Mahasiswa Indonesia serta Peristiwa-peristiwa Demonstrasi pada tanggal 14-15-16 Januari 1974 di Jakarta, *Berita Yudha*, 23 Januari 1974.

rangka membendung aksi protes mahasiswa agar tidak turun ke jalan, yang akhirnya berubah menjadi ajang penggalangan basis kekuatan, yang berujung pada rivalitas diantara keduanya. Oleh karena itu, penulis memetakan rumusan masalah ini menjadi sebuah penulisan skripsi mengenai dampak rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo terhadap pengkebirian politik kampus dan Normalisasi Universitas di Indonesia pada masa Orba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dan mengapa terjadi rivalitas dua bintang dari AD antara Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo?
2. Bagaimana dampak dari rivalitas tersebut terhadap dinamika mahasiswa tahun 1974 hingga diterapkannya kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978?

B. Ruang Lingkup

Penulisan sejarah memerlukan batasan atau ruang lingkup agar lebih fokus dan terarah baik mencakup lokalitas, temporal maupun keilmuan. Batasan lokalitas atau *scope spatial*, membatasi letak geografis dari objek kajian atau tempat terjadinya peristiwa. Dalam skripsi ini spasialnya adalah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Jakarta adalah salah satu kota yang menjadi pusat pergerakan mahasiswa pada saat ingin melancarkan kegiatan demonstrasi anti Jepang. Menjelang kedatangan Perdana Menteri Tanaka ke Jakarta,⁷ untuk menghadiri undangan kenegaraan, sampai akhirnya meletus peristiwa Malari. Adapun Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta adalah daerah yang dijadikan oleh Mayjen Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro untuk melakukan konsolidasi ke kampus-kampus melalui kegiatan memberikan ceramah-ceramahnya dihadapan

⁷M.Hoed, Sekitar Rencana Kunjungan Perdana Menteri Jepang, *Sinar harapan*, 10 Januari 1974.

mahasiswa provinsi tersebut.⁸ Melalui konsolidasi yang dilakukan keduanya di kampus-kampus, membuat terciptanya basis-basis pendukung kedua belah pihak, yang nantinya akan menjadi kajian lebih lanjut secara dalam skripsi ini.

Batasan waktu atau *scope temporal*, menjadi batas cakupan waktu peristiwa berlangsung, yaitu 1974-1978. Tahun 1974 menjadi titik tolak munculnya rivalitas antara Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo, karena pada tahun ini khususnya di paruh pertama tahun 1974 keduanya menduduki jabatan penting dan strategis dalam unsur militer. Pada tahun ini Jenderal Soemitro diangkat menjadi Pangkopkamtib dan Mayjen Ali Moertopo diangkat menjadi Aspri. Pada tahun ini pula terjadi demonstrasi mahasiswa anti Jepang yang lebih dikenal dengan peristiwa Malari. Peristiwa ini melibatkan banyak tokoh-tokoh mahasiswa seperti Fahmi Idris, Soegeng Saryadi, Adnan Buyung Nasution, dan beberapa tokoh lainnya lebih kurang 18 orang ditahan karena mempunyai hubungan dengan peristiwa 15 Januari 1974 yang berujung pada penangkapan–penangkapan dan pengadilan.⁹

Tahun 1978 menandai secara resmi pengkebirian politik kampus, dengan dikeluarkannya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang dilaksanakan berdasarkan pada SK No.0156/U/1978¹⁰. Selain SK tersebut, adapula SK No. 037/U/1979¹¹ tentang bentuk susunan lembaga/organisasi kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Isi dari SK tersebut mengenai Badan Koordinasi Kampus (BKK) yang diberlakukan beberapa waktu setelah Daoed Joesoef dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1979. Kebijakan ini dimaksudkan untuk

⁸Ceramah May.Jen.Ali Moertopo di Yogya, Kritik Di Luar Proporsi Akan Dihajar., *Berita Yudha*, 11 Januari 1974.

⁹Pangkopkamtib Benarkan Adanya Penangkapan-penangkapan, *Berita Yudha*, 21 Januari 1974.

¹⁰Direktorat Peninggian Swasta, *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan tentang Perguruan Tinggi Indonesia*, (Jakarta: CV Donaprin, 1980), hlm. 429.

¹¹Direktorat Peninggian Swasta, *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan tentang Perguruan Tinggi Indonesia*, hlm. 443.

mengarahkan mahasiswa terfokus pada jalur kegiatan akademik dengan menjauhkan mereka dari aktivitas politik praktis.

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, lingkup keilmuan skripsi ini termasuk dalam kategori sejarah politik. Sejarah politik adalah ilmu yang mengkaji segala persoalan yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan beserta konflik-konflik yang diakibatkannya. Dalam hal ini adalah rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo. Adapun ilmu politik adalah ilmu yang secara khusus mempelajari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Tumpuan kajiannya terhadap daya upaya memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat kekuasaan.¹²

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, mengungkap penyebab rivalitas diantara Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo serta bagaimana bentuk pola rivalitas keduanya. *Kedua* merekonstruksi dampak rivalitas yang terjadi antara Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo terhadap dinamika mahasiswa dan politik mahasiswa dengan dikeluarkannya kebijakan NKK/BKK yang diterapkan oleh Daoed Joesoef pada tahun 1978.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penulisan skripsi ini diawali dengan buku yang berjudul *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia* karya Peter Britton.¹³ Pada bagian awal buku ini menjabarkan mengenai ideologi yang terdapat dalam lingkungan militer Indonesia sejak berdiri. Britton melihat adanya integrasi antara unsur-unsur profesionalisme barat, dengan aspek-aspek etika ksatria (berdasar sejarah

¹²Syahrial Syarbaini, *Sosiologi dan politik* (Bogor: Ghalia Indonesia,2004), hlm.13.

¹³Peter Britton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996).

dan legenda Jawa) yang terdapat dalam kalangan elite militer, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk profesionalisme barat dan pengaruhnya terhadap terbentuknya ideologi militer yang ada di Indonesia. Karya dari Peter Britton ini juga memberikan penggambaran hubungan sipil-militer di Indonesia, dengan menggunakan sudut pandang ideologi yang berada di dalam kelompok militer. Integrasi yang berhasil dari pandangan Barat dan pandangan Jawa mengenai militer tidak selalu tampak jelas. Namun demikian, kedua kecenderungan itu telah ada dalam pemikiran para perwira sejak hari-hari permulaan pembentukan Angkatan Darat pada tahun 1945, dan lebih-lebih lagi, kedua pendekatan itu mempunyai sejarah yang bahkan lebih tua lagi dalam masyarakat Indonesia. Aspek kebudayaan merupakan satu aspek dari proses yang lebih besar, dan dengan itu Angkatan Darat memperkuat lembaganya untuk memperoleh kepentingan dalam manajemen ekonomi dan politik yang pada akhirnya menyingkirkan saingan-saingannya.

Pembahasan mengenai integrasi ideologi militer Indonesia dibahas berdasarkan data yang diperoleh, baik dari sumber primer maupun sekunder yang cukup akurat, melalui wawancara yang cukup komprehensif kepada para perwira yang masih aktif dan sudah pensiun, mulai dari yang berpangkat Brigadir Jenderal sampai Letnan Jenderal, para perwira berpangkat menengah (Mayor dan Kolonel) dan para perwira junior dan kadet.

Relevansi karya Peter Britton dengan tema yang diteliti ini, adalah dapat memberikan gambaran bagaimana ideologi-ideologi serta pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam militer Indonesia, terutama pada bab II yaitu mengenai profil petarung yang menyoroti pemikiran dan ideologi yang terdapat dalam kedua belah pihak yang bersaing, dan latar belakang karir keprajuritan kedua petarung. Pemikiran dan ideologi yang berkembang tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai peristiwa yang terkait dengan militer dan politik, termasuk di dalamnya terjadinya konflik-konflik di dalam tubuh militer itu sendiri. Dengan penggambaran perbedaan ideologi dan pemikiran, Britton menjelaskan bahwa menjelang tahun 1971, ideologi Angkatan Darat Indonesia telah berhasil mengintegrasikan aspek-aspek profesionalisme yang berasal dari barat dengan

citra, sikap, dan kewajiban kekstrian yang diangkat dari sejarah dan legenda Jawa. Proses tersebut membuat perwira angkatan darat bersifat konservatif dalam perilaku politiknya, pada masa itu ketika struktur kekuasaan sipil hampir-hampir tidak ada, banyak perwira mempunyai kekuasaan sepenuhnya tidak hanya atas pasukan-pasukan mereka tetapi juga atas pendudukan sipil, dan hal ini tentulah menimbulkan penyimpangan yang berdampak kepada terpusatnya orientasi kepada jantung budaya Jawa. Divisi Diponegoro dipandang sebagai Devisi yang di pimpin oleh *Priyayi* dengan tingkatan yang jauh lebih tinggi dibanding divisi-divisi di Jawa lainnya, sehingga hal ini menimbulkan persaingan dengan divisi-divisi lain. Akan tetapi terdapat sedikit kekurangan yang terdapat dalam karya ini, dalam karyanya Britton hanya memakai analisa ideologi Jawa di dalam menganalisis ideologi militer di Indonesia, sedangkan latarbelakang budaya personil militer Indonesia bukan hanya bersumber pada kebudayaan Jawa, dikarenakan banyak elite militer yang bukan berlatar belakang dari Jawa, nama-nama seperti A.H Nasution dan T.B Simatupang sebagai tokoh sentral dalam pembangunan dan pengembangan. Kedua orang tersebut tidak terlepas dari ideologi budaya Batak.

Pustaka kedua berjudul *Mengawal Nurani Bangsa Jenderal A.H. Nasution: Bersama Mahasiswa "Aset Utama Pejuang Nurani"*.¹⁴ Secara garis besar buku ini menggambarkan mengenai dinamika mahasiswa dan keterlibatan militer dalam perjalanan gerakan mahasiswa. Buku yang bersumber dari pandangan Jenderal A.H. Nasution ini menggambarkan bagaimana peran mahasiswa sebagai alat kontrol kekuasaan, dan menurut pengamatan Jenderal Nasution masalah yang menyangkut bangsa dan negara akan selalu melibatkan dan serta mengundang tanggung jawab mahasiswa sebagai potensi generasi muda penerus bangsa. Pengamatannya didasarkan dari apa yang dilakukan terhadap pertumbuhan bangsa dan praktik-praktik yang ditemukan dalam kondisi kehidupan sosial akan melahirkan kekhawatiran kepada mahasiswa, dimana akan besar kecenderungan

¹⁴AH.Nasution, *Mengawal Nurani Bangsa* (Jakarta: Yayasan Kasih Adik Berkerjasama dengan DISBINTALAD, 2008).

semakin bergesernya dari harapan dan cita-cita semula yang telah mendasari lahirnya kemerdekaan. Kontradiksi-kontradiksi sosial yang ada di masyarakat dapat menumbuhkan ketidakpuasan yang bermuara kepada aksi protes. Pada masa awal Orba, demonstrasi mahasiswa banyak terjadi di Indonesia, salah satunya ialah ketika kedatangan Menteri kerajaan Belanda, yaitu menteri Pronk di Jakarta, keadaanya hampir mirip dengan perkembangan aksi mahasiswa pada tahun 1966, namun perbedaanya yang dahulu ABRI-Mahasiswa saling berpartner, kini saling berhadapan dan konfrontatif. Menurut Jenderal Nasution mengenai isu mengubah kepemimpinan nasional memang sudah lama ia dengar , tetapi hal itu tidak akan terjadi, karena tidak ada momentum yang mendukung hal tersebut, dan adanya rivalitas diantara jenderal-jenderal yang berkuasa, semuanya sama patuh kepada Jenderal Soeharto selaku pimpinan tertinggi.

Berkaitan mengenai relevan dalam tulisan ini, buku ini baik sebagai bahan bacaan penambah pengetahuan, dan sebagai pembanding, mengingat buku ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai gerakan mahasiswa dan hubungannya terhadap elite militer, dalam buku ini juga terdapat pandangan-pandangan Jenderal A.H.Nasution mengenai gaya kepemimpinan selaku pihak kekuasaan, yang selayaknya memberikan partisipasi kepada generasi muda dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut dialog dan komunikasi dua arah harus dilakukan terhadap generasi muda, namun sayangnya buku ini tidak ditulis dalam bentuk penulisan ilmiah sebagaimana karya ilmiah pada umumnya. Selain itu meskipun buku ini memberikan gambaran yang cukup menyerluruh mengenai gerakan mahasiswa, akan tetapi karya ini kurang memberi informasi yang kongkret mengenai faksionalisasi dikalangan elite militer.

Pustaka *ketiga* yang dijadikan tinjauan penulisan skripsi ini adalah karya dari Ramadhan K.H. yang berjudul *Soemitro (Mantan Pangkopkamtib) Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib*.¹⁵ Buku ini menggambarkan perjalanan karir profesional Jenderal Soemitro diawali dari menjabat sebagai Pangdam

¹⁵Ramadhan K.H., *Soemitro (Mantan Pangkopkamtib) Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkatib* (Jakarta: Sinar Harapan,1994).

(Panglima Daerah Militer) Mulawarman sampai dengan pensiun sebagai perajurit profesional. Dalam buku ini dipaparkan mengenai kondisi kontelasi politik nasional, dengan menyoroti peranan militer dalam kontelasi politik nasional. Secara garis besar bagian-bagian dalam buku ini dipisahkan menjadi dua periode, yaitu masa dimana saat Jenderal Soemitro menjabat sebagai Pangdam Mulawarman sampai dengan menjabat sebagai Pangkopkamtib, saat menjadi Pangkopkamtib terdapat beberapa aspek yang menjadi isi atau substansi yang dijelaskan, yaitu aspek pemerintahan termasuk politik, dan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Aspek-aspek tersebut diuraikan dan dibahas berdasarkan data yang diperoleh, yang bersumber pada keterangan dan pengalaman Jenderal Soemitro. Buku ini sangat relevan dengan tema yang diteliti karena di dalamnya dipaparkan mengenai hubungan Jenderal Soemitro terhadap mahasiswa dan aksi-aksi protes yang terjadi, terutama pada bab III yaitu tentang rivalitas keduanya, dengan menyoroti keterlibatan mahasiswa mengenai rivalitas keduanya. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sebelum gelombang aksi protes terjadi, Jenderal Soemitro mengunjungi kampus-kampus untuk melakukan dialog dengan mahasiswa mengenai kepemimpinan sosial.

Beberapa dialog yang dilaksanakan di berbagai Universitas-universitas di Jawa Timur dan Yogyakarta bermuara kepada kritik keras yang diutarakan kepada Jenderal Soemitro, para mahasiswa mengutarakan kritik mengenai pembangunan dan penanaman modal asing yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, namun kritik berjalan komunikatif antara Jenderal Soemitro dan para mahasiswa. Pendekatan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh Jenderal Soemitro membuat mahasiswa berani mengeluarkan pendapat dan buah pikirnya, sehingga menimbulkan rasa simpati dikalangan mahasiswa, dan hal inilah yang mengakibatkan timbulnya isu penggantian pemimpin nasional. Meski demikian karya Ramadhan K.H. ini memiliki kekurangan, yaitu tidak menjelaskan mengenai kelompok mahasiswa yang saling bertikai, dan hal itulah yang menjadi perbedaan dengan skripsi ini, dan perlu kajian lebih lanjut. Selain itu, buku ini hanya menggunakan sumber yang didominasi surat kabar Sinar Harapan dalam melakukan rekonstruksi tersebut, dan juga kurang memberikan gambaran ilmiah

dan komprehensif, sehingga buku ini tidak memiliki sumber pembandingan dalam melakukan metode penelitian. Perbedaan mendasar antara karya Ramadhan K.H dengan skripsi ini adalah terletak pada penulisan profil Jenderal Soemitro, karya Ramadhan K.H. mengacu kepada ruang lingkup temporal pada saat Jenderal Soemitro menjabat sebagai Panglima Daerah Militer Mulawarman sampai menjabat sebagai Pangkopkamtib, sedangkan penulisan profil dalam skripsi ini mengacu kepada riwayat karir Jenderal Soemitro mulai dari pendidikan militer Jepang sampai dengan menjabat sebagai Pangkopkamtib. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk melihat latarbelakang ideologi yang melekat pada Jenderal Soemitro.

Pustaka yang *keempat* yang dijadikan tinjauan dalam merekonstruksi rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo adalah buku *Rahasia-Rahasia Ali Moertopo*¹⁶ yang disusun oleh surat kabar *Kompas*, sebuah tinjauan yang merekonstruksi mengenai sepak terjang Mayjen Ali Moertopo dari karir kemiliteran sampai dengan karir politik, buku ini dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk menganalisis tipe-tipe orientasi militer Mayjen Ali Moertopo. Buku ini juga menggambarkan bagaimana *manuver* yang dilakukan oleh Mayjen Ali Moertopo terhadap gerakan mahasiswa, dan juga menjelaskan mengenai keterlibatan Mayjen Ali Moertopo dengan peristiwa politik dalam negeri dan luar negeri.

Ali Moertopo dipandang sebagai pembuka jalan berdirinya rezim Orba dan orang yang bersitegang dengan Jenderal Soemitro mengenai aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu, buku ini juga membahas secara singkat peran Center Strategic of Internasional Studies (CSIS), suatu lembaga riset yang didirikan oleh Ali Moertopo, lembaga yang berfungsi membuat kajian sebagai landasan dalam membuat kebijakan negara, baik dalam politik maupun hankam, dan lembaga inilah yang juga menjadi sasaran protes mahasiswa, karena dianggap otak dan pelobi utama di balik kebijakan ekonomi Presiden Soeharto, yang cenderung lunak terhadap korporasi asing. Mengenai rivalitas yang terjadi diantara para elite

¹⁶Purwanto Setiadi,dkk, *Rahasia-Rahasia Ali Moertopo* (Jakarta: TEMPO, 2014).

militer tersebut, buku ini memberi informasi bagaimana sikap preventif yang dilakukan oleh Ali Moertopo terhadap mahasiswa, dan juga kubu-kubu yang dianggapnya berpotensi merongrong kekuasaan. Oleh sebab itu buku ini relevan untuk dijadikan tinjauan dan rujukan dalam merekonstruksi rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo.

Meskipun demikian terdapat perbedaan mendasar antara karya Purwanto Setiadi dengan skripsi ini, perbedaan tersebut terletak pada penulisan profil Mayjen Ali Moertopo, jika karya Purwanto Setiadi hanya membahas permasalahan secara singkat dan mengacu kepada isu-isu besar untuk melihat sepak terjang politik Mayjen Ali Moertopo. Maka penulisan profil dalam skripsi ini mengacu kepada riwayat karir Mayjen Ali Moertopo mulai dari kehidupannya sebagai pegawai sipil lalu bergabung dengan Laskar Hizbullah sampai dengan karirnya di dunia telik sandi. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk melihat latar belakang ideologi yang melekat pada Mayjen Ali Moertopo.

Pustaka yang kelima berjudul *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 dalam Percaturan Politik Nasional* karya Hariyadhie.¹⁷ Secara garis besar buku ini menggambarkan fase-fase penting mengenai dinamika mahasiswa pada tahun 1978 menjelang turunya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus NKK/BKK. Dalam buku ini dipaparkan mengenai perspektif gerakan mahasiswa sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan NKK/BKK. Dalam rekonstruksinya Hariyadhie menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa sebelum diterapkannya kebijakan NKK/BKK, gerakan mahasiswa memiliki kontelasi sosial politik dan partnership yang kental dengan kalangan elite ABRI. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya gerakan 78. Pertama adalah berkembangnya isu yang menyangkut kepincangan-kepincangan sosial yang disebabkan kehidupan aparat pemerintah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan pengabaian hak asasi manusia, dan yang kedua adalah peranan dewan mahasiswa sebagai fasilitas pendukung dalam mengorganisasi dan memobilisasi

¹⁷Hariyadhie, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 dalam Percaturan Politik Nasional* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994).

aksi-aksi protes. Ketiga adanya peluang politik yang secara langsung dan tidak langsung diberikan oleh penguasa. Melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah tidak memberikan tekanan atau sanksi mengenai aksi protes. Peluang yang kondusif tersebut rupanya sebagai salah satu jalan mempercepat tumbuhnya keberanian mahasiswa untuk melakukan aksi-aksi protes terhadap pemerintah maupun lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Melihat efektifitasnya gerakan mahasiswa dengan menggunakan kelembagaannya dalam melakukan “*manuver*” politik, mendorong pemerintah mengambil sikap keras untuk membendung aksi-aksi protes mahasiswa, maka pemerintah kemudian mengambil sikap membekukan Dewan Mahasiswa dan menggantikannya dengan konsep NKK, dengan melalui konsep NKK merupakan babak akhir dari basis kekuatan gerakan mahasiswa yang potensial tersebut.

Relevansi buku ini dengan tema yang diteliti ialah, buku ini menguraikan bagaimana kondisi dinamika mahasiswa pasca diturunkannya kebijakan NKK/BKK, terutama pada bab IV yaitu menyoroti dampak dari turunnya kebijakan NKK/BKK terhadap politik kampus, sehingga substansi dan isi buku ini dianggap relevan untuk dijadikan tinjauan dan rujukan. Meskipun demikian buku ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu karya ini kurang menyajikan data yang komprehensif mengenai hubungan gerakan mahasiswa dan kepentingan elite militer secara personal. Walaupun begitu, karya ini memberi manfaat yang tidak sedikit dalam memahami dinamika mahasiswa pada kurun waktu sesudah dan sebelum diterapkannya kebijakan NKK/BKK. Berbeda dari studi yang telah dilakukan, penulisan skripsi ini akan memfokuskan rivalitas Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo dan dampaknya terhadap politik kampus.

Pustaka *Keenam* yang dijadikan rujukan untuk merekonstruksi dinamika mahasiswa setelah diberlakukannya kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978 adalah karya Didik Supriyanto yang berjudul *Perlawanan Pers Mahasiswa Protes Sepanjang*

NKK/BKK.¹⁸ Karya Didik Supriyanto ini dianggap relevan karena buku ini banyak menggambarkan tentang gerakan mahasiswa setelah ditetapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) oleh pemerintah. Perlawanan melalui pers mahasiswa dipilih sebagai media protes untuk mengatasi kemacetan komunikasi antar mahasiswa yang terjepit dalam iklim pengekangan ruang gerak. Cara ini juga dipilih karena untuk membuktikan bahwa mahasiswa bisa menjadi kekuatan yang mandiri dan terlepas dari kaitannya dengan kekuatan elite militer.

Meskipun karya Didik Supriyanto ini menjelaskan secara komprehensif tentang lembaga pers mahasiswa sebagai media protes, namun buku ini banyak melewatkan suatu ‘sampel’ penting, karya ini hanya merujuk pada dua lembaga pers mahasiswa yaitu *Balairung* yang diterbitkan oleh Badan Penerbit Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM) dan lembaga pers mahasiswa *Solidaritas* yang diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Nasional (LPM Unas) sebagai objek penelitiannya, dan mengaitkannya dengan aksi protes yang terjadi sepanjang garis Jakarta-Semarang-Salatiga-Yogyakarta. Jika berbicara mengenai protes mahasiswa sepanjang 1978 sampai dekade 1980-an tidak bisa dilepaskan dari aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa Jakarta-Yogyakarta-Bandung. Ketiga kota itu selama ini dikenal sebagai pusat-pusat gerakan mahasiswa. Meskipun demikian karya Didik Supriyanto ini sangat relevan untuk melihat pola-pola yang terjadi di dalam dinamika mahasiswa pasca diterapkannya Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

E. Kerangka Pemikiran

Langkah yang sangat penting dalam membuat suatu analisis dalam rekonstruksi sejarah adalah dapat menyajikan suatu kerangka pemikiran/kerangka teori/

¹⁸Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa Protes Sepanjang NKK/BKK* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 17.

pendekatan/kerangka konsep, yang akan dipakai dalam membuat analisis itu.¹⁹ Oleh sebab itu, penggambaran terhadap suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan, yaitu dari segi mana memandang permasalahan tersebut, dimensi mana yang menjadi titik perhatian, dan unsur-unsur mana saja yang diungkapkan, dan lain sebagainya. Pendekatan sangat menentukan analisis penulis dalam mengungkap suatu permasalahan.

Skripsi ini mengkaji Rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo dan dampaknya terhadap pengkebirian politik kampus. Dalam konteks pembahasan skripsi ini perlu ditegaskan pengertian dari rivalitas itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "rivalitas" diartikan sebagai persaingan, permusuhan, pertentangan dua kelompok atau lebih.²⁰ Rivalitas yang terjadi antara Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo memiliki hubungan dan dampak terhadap dinamika mahasiswa pada masa itu, karena pada sekitar tahun 1970-1974 peranan generasi muda dalam politik tidak hanya terbatas pada kontrol sosial dan partisipasi sosial, akan tetapi juga cenderung menciptakan elite politik baru yang berorientasi ke bawah dan bukan ke atas,²¹ dan cenderung menimbulkan aksi protes yang cukup besar, sehingga gerakan mahasiswa sering dianggap sebagai tindakan subversi. Subversi yang dimaksudkan adalah gerakan usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar Undang-Undang.²² Tindakan yang dilakukan mahasiswa tersebut bermuara kepada dilarangnya mahasiswa untuk terlibat dalam politik praktis. Secara implisit politik praktis adalah keadaan dimana ambisi dan kepentingan hadir bersamaan dan saling berhimpit untuk ikut serta dalam memperebutkan kekuasaan. Dampak

¹⁹Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: P.T.G ramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 2.

²⁰Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 959.

²¹Peranan Generasi Muda Sangat Besar dalam Pengembangan dan Pengarahan Kehidupan Politik Dewasa ini., *Kompas*, 10 Januari 1974.

²²Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.1096.

dari gerakan mahasiswa yang dipandang sebagai politik praktis menimbulkan stigma bahwa gerakan mahasiswa merupakan suatu tindakan makar. Berdasarkan KBBI makar adalah suatu istilah dari perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah.²³ Pada dasarnya makna dari kata makar dan subversi tidak jauh berbeda karena sama-sama memiliki arti suatu tindakan pengambil-alihan kekuasaan dengan cara inkonstitusional. Tindakan subversi pada masa Orba dipandang dengan multitafsir, bahkan suatu tindakan protes dapat dianggap sebagai tindakan subversi atau makar. Seperti protes yang dilakukan mahasiswa yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1972 yang berujung pada pembakaran yang dipandang oleh pemerintah sebagai gerakan yang ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan kekuasaan.²⁴ Untuk menganalisis hubungan gerakan mahasiswa dan tentara perlu dikaji bagaimana model-model tentara yang terdapat dalam organisasi militer di Indonesia. Menurut Soeripto dalam jurnal Prisma²⁵ menyatakan bahwa menjelang dekade 1970an terdapat tiga golongan dalam organisasi militer di Indonesia. Pertama golongan yang memang bergaris keras, fasistis. Kedua, golongan yang berorientasi pada komunis, dan ketiga golongan militer yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi. Golongan yang terakhir inilah yang memiliki kedekatan dengan mahasiswa. Untuk mengkaji hubungan variabel bebas dan variabel terikat mengenai rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo dan hubungan terhadap pengkebirian politik kampus, maka diperlukannya sebuah pendekatan multidimensional, mengingat penulisan skripsi ini bersifat *problem oriented*, dengan demikian untuk membantu dalam analisis skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan dari ilmu politik, sosiologi politik, dan juga pendekatan ilmu

²³Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.702.

²⁴Cerminan Tanah Air: Komentar Peristiwa Sepekan., *Angkatan Bersenjata*, 4 Februari 1974

²⁵“Kecan Mahasiswa dan Tentara”, *Prisma*, No.12 Desember 1977.

psikologi, yaitu psikologi sosial dan psikologi masa. Hal ini bertujuan untuk menganalisis tentang konsep peranan, perbedaan, persaingan.

Politik adalah perjuangan atau cara guna mendapatkan kekuasaan.²⁶ Sementara itu, Jack C. Plano menjelaskan bahwa politik adalah persaingan di antara para individu dan kelompok atas alokasi ganjaran atau nilai-nilai dalam masyarakat, yang mencakup proses pengendalian sosial, termasuk lingkungan dan pencapaian tujuan bersama. Berbagai corak politik dengan mudah terlihat pada setiap kelompok sosial seperti: pengambilan keputusan, pencarian kekuasaan, pengalokasian nilai, dan cakupan tujuan.²⁷

Suatu hubungan dua kelompok atau lebih di dalam suatu negara terlebih hubungan yang bersifat politik, polanya akan selalu diwarnai perubahan suatu sistem politik yang mereka jalankan, perubahan kepentingan arah dan perbedaan orientasi akan berpotensi menimbulkan suatu konflik. Perubahan politik bisa terjadi karena perubahan sistem sebagai akibat dari tuntutan baru yang di sebabkan karena dorongan dari unsur tertentu dan perubahan lingkungan, atau karena sistem tidak lagi mampu dipertahankan lagi, sehingga diganti dengan sistem lain.²⁸ Di Indonesia perubahan sistem politik akan mudah berubah seiring pergantian kepemimpinan nasional, pada waktu itu Indonesia mengalami suatu perubahan yang cukup fundamental dalam sistem pemerintahan dan sistem politiknya, ialah perubahan rezim dari Orde Lama (orla) ke Orba.²⁹ Suatu perubahan sistem politik, akan selalu ada ketidakpastian mengenai terjadi suatu perubahan yang mendasar, sebagai bagian dari kenyataan situasi politik. Setiap perubahan struktural di dalam sistem politik sering disertai bahkan didahului oleh perubahan sikap, orientasi, dan keyakinan, dikalangan kelompok yang

²⁶Soerjono Soekamto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: P.T Rajawali, 1983), hlm. 119.

²⁷Jack C.Plano, *Kamus Analisa Politik* (Jakarta: P.T Rajawali, 1989), hlm. 163&334.

²⁸Tom Bottmore, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: P.T Bina Aksara, 1983), hlm. 83.

²⁹Indira Riauskina intan, “Kepemimpinan”, dalam Sarwono.W Sarlito,*Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika 2009), hlm 187-196.

berpengaruh dalam sistem yang sedang dijalankan.³⁰ Permasalahan demikian juga terjadi pada Indonesia, pada masa rezim Orba, perbedaan orientasi terjadi pada elite militer yang memiliki pengaruh, karena disebabkan adanya perubahan struktur yang bermuara kepada kompetisi. Hal ini berkaitan dengan teori konflik realitas³¹ Berdasarkan teori konflik realitas dijelaskan mengapa kelompok saling berkompetisi atau mengalami rivalitas satu sama lain, karena adanya hubungan fungsional antara dua kelompok atau lebih, dan sifat bias, prasangka ataupun konflik antar kelompok terjadi karena adanya kompetisi untuk memperebutkan sumber daya, yang berupa benda, peluang, bahkan kekuasaan. Teori ini berpatokan, pertama pada asumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah egois dan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan pribadinya, yang kedua konflik tercipta dikarenakan adanya perbedaan kepentingan satu sama lain, dan yang ketiga bahwa aspek psikologi sosial dari hubungan antar kelompok ditentukan apabila adanya kecocokan minat antar kelompok.³²

Berkaitan dengan rivalitas yang terjadi di antara elite militer tersebut, analisis selanjutnya akan didasarkan pada pendekatan teori yang dikemukakan oleh Amos Parlmutter dan Samuel P. Huntington. Amos Parlmutter mengelompokkan dan memetakan tipe-tipe tentara berdasarkan orientasi mereka. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tipe-tipe apa yang melekat pada Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo, jika dilihat dari orientasinya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perubahan kepentingan arah dan perbedaan orientasi dalam hubungan yang bersifat politik akan berpotensi menimbulkan suatu konflik.³³ Amos Parlmutter mengklasifikasikan tentara sebagai berikut:

³⁰Robert Dahl, *Analisa Politik Modern* (Jakarta: P.T Bina Aksara, 1994), hlm. 76.

³¹Iyabu, Ahmad Fauzi, "Faksionalisasi Dalam Tubuh TNI AD dan Pengaruhnya dalam Konflik Internal TNI AD Tahun 1952-1955" (Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2006).

³²Ariyanto Amarina, "*Hubungan antar Kelompok*", dalam Sarwono.W Sarlito, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 251.

³³ Bottmore, *Sos Pol* , hlm. 83.

Tabel 1.1 Tipe dan Orientasi Militer³⁴

Ciri-ciri	Tentara Profesional	Tentara <i>Pretorian</i>	Tentara Revolusioner
Keahlian	Pengetahuan khusus yang didasarkan atas standar obyektif dari kompetensi profesional	Pengetahuan professional tidak diperhatikan dengan ketat sekali	Pengetahuan professional diarahkan kepada nilai-nilai sosial politik
Klien	Negara	Salah satu dari yang berikut: bangsa, kelompok, suku, militer, dan Negara	Gerakan partai atau organisasi lainnya
Sifat lembaga (Tipe Kekuasaan)	Hirarki, kohesif, organik, kolektif, sub-ordinasi, otomatis/manipulatif, sempit	Hirarki, tidak kolektif, mengubah kepatuhan, sempit	Sebelum dan selama revolusi: egalitarian, sangat mobil, kader manipulatif, luas
Penerimaan	Terbatas, hanya universal pada masa perang	Terbatas	Universal
Ideologi	Konservatif	Tradisional materialis, anti sosialis, praetorian	Revolusioner, gerakan partai
Kecenderungan untuk campur tangan	Rendah	Permanen atau berkelanjutan	Tinggi sebelum dan selama revolusi, rendah setelah revolusi

Sumber: Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, terjemahan Sahat Simamora, hlm. 24.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dibedakan ciri-ciri tentara sesuai dengan orientasi dan sikap mereka mengenai politik, pembagian tipe tentara/militer ke dalam 3 kelompok yakni; Profesional; Pretorian; dan Revolusioner, merupakan pengembangan atas teori Samuel P. Huntington mengenai Militer dan Politik, yang hanya membagi tipe tentara menjadi profesional dan *Pretorian* saja. Dengan demikian, klasifikasi yang dipetakan oleh Amos Parlmutter dapat menjadi alat bantu dalam melihat hubungan sipil-militer, secara kongkrit teori ini dapat digunakan sebagai panduan untuk melihat orientasi dan ideologi Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo mengenai keprofesionalan ABRI, juga

³⁴Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, terjemahan Sahat Simamora (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 24.

sebagai panduan dalam melihat perbedaan strategi keduanya disaat menangani gerakan mahasiswa, menjelang peristiwa Malari pada tahun 1974.

Kaum intelektual termasuk mahasiswa memiliki peranan penting dalam perubahan sosial, tetapi tidak selalu menentukan. Sejarah mencatat bahwa kaum intelektual kerap kali berdampingan dengan gerakan sosial dan sosial-nasionalis dalam melawan kolonialisme dan kediktatoran pada masa Orba. Secara umum gerakan sosial memiliki definisi yang luas karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya. Tarrow menyatakan bahwa gerakan sosial sebagai politik perlawanan, terbentuk ketika rakyat arus bawah bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh dan menggalang kekuatan untuk melawan para elite, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Tarrow juga menyatakan bahwa tindakan yang mendasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang memiliki hasrat untuk melawan. Tindakan kolektif bisa mengambil banyak bentuk, yang singkat maupun yang berkelanjutan, terlembagakan atau cepat bubar, membosankan atau dramatis. Umumnya tindakan kolektif berlangsung ketika orang-orang di dalam suatu kelompok bergabung dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama.³⁵ Pada tataran teoritis para ahli ilmu sosial telah mengembangkan khasanah pengetahuan dan wacana yang sangat kaya dan terus berkembang hingga kini. Beberapa diantaranya adalah teori nilai tambah *added value*, teori mobilisasi sumberdaya *resource mobilization* J. Smelser. Ketimpangan sosial yang terjadi akibat negara yang abai terhadap masa depan rakyatnya, dapat menjadi salah satu pemantik timbulnya gerakan sosial. Peranan agen-agen gerakan sosial mutlak sangat dibutuhkan untuk memikirkan bagaimana solusi yang seharusnya ditempuh, dan kerap kali mobilisasi sumberdaya menjadi pilihan untuk melakukan protes terhadap kebijakan penguasa.

Hubungan *partnership* antara mahasiswa dan elite militer sudah terlihat pada masa generasi angkatan 66, pada saat gerakan mahasiswa menjadi bercampur

³⁵Buku Seri Pengantar Demokrasi, *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia* (Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Berkerjasama dengan AVERROES PRESS, 2006), hlm. 1-6.

dengan kontelasi sosial-politik dan kepentingan percaturan politik di antara kalangan elite militer.³⁶ Walaupun jika di tinjau dari Psikologi Sosial, pada dasarnya Mahasiswa Indonesia bukanlah orang yang suka protes, Sarlito.W.Sarwono dalam desertasinya berpendapat bahwa mahasiswa bukanlah sumber gejolak sosial.³⁷ Hubungan antara gerakan mahasiswa dengan unsur-unsur kekuatan militer pada sekitar peristiwa 1974, secara transparan diwarnai oleh berbagai corak kepentingan yang bersumber dari percaturan politik di kalangan elite militer.³⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.³⁹ Metode penelitian sejarah kritis terdiri dari empat tahapan pokok yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi fakta dan historiografi⁴⁰. Tahap pertama adalah heuristik, berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* yang berarti memperoleh.⁴¹ Heuristik merupakan suatu proses untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber

³⁶Hariyadhie, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 dalam Percaturan Politik Nasional* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), hlm. 3.

³⁷Disertasi Dr Sarlito Wirawan: Mahasiswa Indonesia Pada Dasarnya Bukan Orang Yang Suka Protes, dalam *Suara Merdeka*, 3 Mei 1978.

³⁸ Hariyadhie, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978* , hlm. 7.

³⁹Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32

⁴⁰Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

⁴¹G. J. Renier, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, terjemahan Muin Umar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 113.

sekunder. Sumber-sumber yang dicari ialah sumber-sumber yang relevan dengan tema yang diteliti.

Sumber primer penulisan ini berasal dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang relevan, serta surat kabar sejaman. Arsip-arsip tersebut baik yang tersimpan di Arsip Daerah Jawa Tengah, Arsip Nasional Republik Indonesia, arsip perorangan, maupun arsip yang tersimpan dalam dinas-dinas militer seperti Museum dan Pusat Sejarah TNI, Museum Mandala Bhakti, Arsip Dinas Sejarah Angkatan Darat Bandung. Secara keseluruhan arsip merupakan bahan-bahan penting sebagai pemberi informasi dasar tentang banyak aspek sejarah Indonesia modern. Sedangkan beberapa surat kabar sejaman diperoleh oleh penulis dari koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Pusat Dinas Sejarah Angkatan Darat Bandung dan Depo Arsip Suara Merdeka, Surat kabar yang di peroleh oleh penulis diantaranya, *Angkatan Bersenjata*, *Berita Yudha*, *Berita Buana*, *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Suara Merdeka*. Surat Kabar tersebut berisi tentang .pergulatan mahasiswa menjelang peristiwa Malari, pembahasan adanya persaingan di antara Jenderal- jenderal AD, dan intruksi presiden mengenai normalisasi kehidupan kampus, dan peristiwa lainnya yang dianggap relevan dengan penulisan skripsi ini.

Selain itu untuk menunjang data yang diperoleh dari arsip-arsip maupun dokumen, penulis juga melakukan wawancara dengan informan yang terlibat langsung dan orang-orang yang tidak terlibat langsung. Wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh gerakan mahasiswa pada masa Malari antara lain Hariman Siregar (Mantan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia). Wawancara juga dilakukan kepada tokoh-tokoh mahasiswa yang berseberangan dengan aksi protes yang dilakukan pada masa Malari seperti Eko Sugiarto dan Edi Martono (Mantan Anggota Dewan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan sekaligus Mantan Redaktur Gelora Mahasiswa). Selain itu wawancara juga dilakukan kepada pihak yang dianggap mengetahui riwayat hidup kedua tokoh tersebut Suwarno (Purnawirawan TNI AD KODAM IV DIPONEGORO), Mundakir (Masyarakat Desa Krapyak), dan Sulus (Anak angkat Sutopo Yuwono).

Sumber sekunder diperoleh melalui riset kepustakaan meliputi buku-buku karangan ilmiah yang ditulis oleh para ahli yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa melalui penelusuran dan penelaahan kepustakaan, dapat dipelajari bagaimana mengungkapkan buah pikiran secara kronologis, sistematis dan kritis.⁴² Data pendukung juga di peroleh dari majalah atau jurnal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dikaji. Sumber sekunder digunakan untuk membantu dalam melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.

Tahap kedua adalah kritik sumber, meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern penting dilakukan guna mengetahui otensitas atau keaslian sumber, dan sekiranya dianggap perlu atau tidaknya untuk mendukung penulisan, sedangkan kritik intern penting untuk menentukan apakah sumber yang digunakan kredibel, dapat dipercaya atau tidak. Kritik akan dilakukan terhadap informasi yang diperoleh dari para informan, yang kemudian dilakukakan koroborosi dengan data dari berbagai sumber tertulis yang telah di seleksi dan dianggap relevan, begitu pula sebaliknya dilakukan kritik dengan membandingkan data dari sumber tertulis dengan keterangan yang diperoleh dari informan. Selain itu, kritik juga dilakukan terhadap berbagai arsip atau dokumen yang telah di peroleh, antara lain seperti: denah lokasi, foto-foto dan sebagainya.

Tahap ketiga adalah Interpretasi, yaitu usaha melakukan penafsiran-penafsiran dan menyusun fakta-fakta sehingga menjadi keseluruhan yang masuk akal dan relevan dengan masalah yang diteliti. Pada tahap ini fakta disintesis dalam bentuk analisa dan argumen, sehingga dapat dimengerti.

Tahap yang terakhir adalah Historiografi, atau tahap terakhir dalam melakukan rekonstruksi peristiwa sejarah dengan melakukan penulisan kembali peristiwa sejarah. Dalam tahap ini fakta yang sudah dianalisis dan disintesis harus dipaparkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan bahasa yang baik, sehingga dapat dipahami oleh pembaca.

⁴²Irawati Singarimbun "*Pemanfaatan Perpustakaan*", dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.45.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab satu merupakan bab pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup, kerangka teoritis dan pendekatan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan penggunaan sumber, serta sistematika.

Bab dua berjudul Profil petarung: Prajurit Profesional dan Prajurit Revolusioner. Bab ini diawali dengan gambaran kondisi sosial politik militer pada dekade 1970an dan dilanjutkan dengan dua subbab yang membahas mengenai profil dari Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo. Profil akan di analisis dari riwayat hidup dan karir kemiliteran sampai karir politik kedua belah pihak, dengan melihat dari perbedaan model orientasi kedua prajurit tersebut, sampai terjadinya faksionalisasi dalam tubuh angkatan darat yang mengarah ke arah rivalitas tersebut. Pada bab ini juga akan membahas kondisi kontelasi politik nasional pada masa itu.

Bab tiga berjudul rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo. Bab ini memuat pembahasan tentang corak rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo. Bab ini terbagi menjadi tiga subbab, yaitu subbab pertama membahas mengenai pergerakan mahasiswa dekade 1970an. Subbab yang kedua membahas mengenai munculnya rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo serta bagaimana sepak terjang keduanya dalam menjalankan peran dan orientasi politiknya terhadap mahasiswa. Dengan memanfaatkan jabatan yang dimiliki sebagai Pangkoptamb dan Aspri, mereka melakukan ceramah dan diskusi di kampus-kampus untuk mencari basis dan power. Subbab ketiga membahas mengenai puncak persaingan Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo yang terlihat dari pecahnya mahasiswa menjadi dua kubu yang berseberangan mengenai aksi protes yang ditujukan kepada pemerintah, dan puncaknya pada peristiwa Malari.

Bab empat berjudul dampak rivalitas Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo. Dalam bab ini memuat/ penjelasan tentang dampak yang timbul akibat rivalitas kedua elit militer tersebut terhadap dinamika politik mahasiswa, yang terbagi dalam tiga subbab. Subbab pertama menjelaskan tentang reaksi dari

pimpinan nasional selaku pihak ketiga mengenai rivalitas tersebut, dengan memberi orientasi yang berbeda kepada keduanya mengenai stabilitas keamanan nasional, yang berujung kepada pengunduran diri dan pemindahan jabatan yang terjadi pada keduanya. Sementara dari pihak mahasiswa banyak terjadi penangkapan-penangkapan yang terlibat dalam peristiwa Malari,⁴³ yang berujung pada pengadilan seperti yang dialami oleh saudara Hariman Siregar dkk, yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua DMUI dan juga koordinator demonstrasi.⁴⁴ Subbab kedua membahas tentang reaksi Presiden Soeharto terhadap demonstrasi mahasiswa yang pada waktu itu dianggap sebagai tindakan subversi yang mengarah kepada tindakan makar dan mengganggu ketertiban, yang berujung pada Normalisasi Universitas-universitas, dengan turunnya kebijakan NKK dan BKK yang dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978. Selain dikeluarkannya kebijakan NKK/BKK, juga terjadi tindakan pembredelan pers yang dilakukan oleh Ali Moertopo saat menjadi Menteri Penerangan.

Subbab ketiga berisi pembahasan tentang melemahnya politik mahasiswa sebagai akibat dari kebijakan NKK/BKK yang dibuat untuk mengkebiri politik mahasiswa. Agar mahasiswa terfokus pada jalur kegiatan akademik, dengan menjauhkan mahasiswa dari aktivitas politik yang dianggap oleh pemerintah mengganggu keamanan dan ketertiban.

Bab lima merupakan bab kesimpulan. Bab ini berupa jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan pada sebelumnya.

⁴³Pangkopkamtib Benarkan Adanya Penangkapan-Penangkapan, *Berita Yudha*, 21 Januari 1974.

⁴⁴C.Van Dijk, *Pengadilan Hariman Siregar*, terjemahan Erpan Faryadi (Jakarta: TePLOK PRESS, 1999), hlm 1-8.